

**IMPLEMENTASI GREEN ACCOUNTING PADA DAERAH RAWAN BENCANA  
(STUDI FENOMENOLOGIS PADA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN BANJARNEGARA)**

**Ita Nuryana<sup>1)</sup> Wulan Suci Rachmadani<sup>2)</sup> Kuat Waluyo Jati<sup>3)</sup>**

Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang

maniezzita@yahoo.com<sup>1)</sup> wulansucirachmadani@gmail.com<sup>2)</sup>

kuatwaluyojati@gmail.com<sup>3)</sup>

***Abstract***

*The purpose of this research is to know whether Local Government of Banjarnegara Regency: 1) Able to implement green accounting at public institution in Banjarnegara District Government. 2) To increase knowledge in the realm of financial accounting and management on green accounting. Type of research used in this research is qualitative research with descriptive method. Qualitative research procedure with phenomenological approach, after horizationaliting and statement of each participant has been collected into the unit of meaning and written a picture of how the experience occurred, then the results are developed through the overall description of the existing phenomenon so as to find the essence of the phenomenon. The results obtained that the understanding of green accounting implementation in Banjarnegara area is good. This is evident from the results of in-depth interview and observation of the participants already know the procedures regarding the management of disaster emergency response, financial statements on green accounting produced by Local Government Banjarnegara already integrated well and audited by BPKP and appointment of public accounting firm.*

**Keywords:** *Green accounting, Environment, Disaster Prone Areas*

**Abstrak**

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara: 1) Mampu mengimplementasikan *green accounting* pada instansi publik di Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara. 2) Untuk menambah keilmuan dalam ranah akuntansi keuangan dan manajemen mengenai *green accounting*. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Prosedur penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis, setelah dilakukan *horizationaliting* dan pernyataan masing-masing partisipan telah dikumpulkan ke dalam unit makna dan ditulis gambaran tentang bagaimana pengalaman tersebut terjadi, selanjutnya hasil tersebut dikembangkan melalui uraian secara keseluruhan dari fenomena yang ada sehingga menemukan esensi dari fenomena tersebut. Hasil Penelitian diperoleh bahwa Pemahaman implementasi *green accounting* di daerah Banjarnegara sudah baik. Hal ini terbukti dari hasil *in-depth interview* dan observasi partisipan sudah mengetahui prosedur mengenai pengelolaan berkaitan tanggap darurat bencana, laporan keuangan mengenai *green accounting* yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah Banjarnegara sudah terintegrasi dengan baik dan diaudit oleh BPKP maupun penunjukan kantor akuntan publik.

**Kata Kunci:** *Green accounting, Lingkungan, Daerah Rawan Bencana*

## PENDAHULUAN

*Green accounting* merupakan ilmu akuntansi yang mengakui adanya faktor biaya lingkungan ke dalam hasil kegiatan perusahaan. Menurut EPA, akuntansi hijau merupakan bentuk pendekatan gabungan yang menyediakan bentuk transisi data dari akuntansi keuangan dan akuntansi biaya untuk meningkatkan efisiensi bahan dan mengurangi dampak serta risiko lingkungan sekaligus mengurangi biaya perlindungan lingkungan.

Konsep *green accounting* sebenarnya sudah mulai berkembang sejak tahun 1970-an di Eropa, hal ini terjadi karena tekanan lembaga-lembaga bukan pemerintah dan meningkatnya kesadaran lingkungan di kalangan masyarakat yang mendesak agar perusahaan-perusahaan bukan sekedar berkegiatan industri demi bisnis saja, tetapi juga menerapkan pengelolaan lingkungan. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi pengelolaan lingkungan dengan melakukan penilaian kegiatan lingkungan dari sudut pandang biaya (*environmental costs*) dan manfaat atau efek (*economic benefit*), serta menghasilkan efek perlindungan lingkungan (*environmental protection*) (Almilia dan Wijayanto, 2007 dalam Kusumaningtias, 2013).

Selain tekanan dan *issue* dunia mengenai akuntansi lingkungan telah mulai berkembang, hal ini diperkuat adanya penelitian-penelitian yang terkait dengan *issue green accounting* tersebut di tahun 1980-an (Bebbington, 1997; Gray, dkk). Istilah lain yang terkait dengan *green accounting* adalah *environmental accounting* sebagaimana yang ditegaskan oleh Yakhou dan Vernon (2004) yakni penyediaan informasi pengelolaan lingkungan untuk membantu manajemen dalam memutuskan harga, mengendalikan *over-head* dan pelaporan informasi lingkungan

kepada publik. McHugh (2008) menjelaskan kinerja lingkungan ini dengan istilah *Sustainability Accounting*. Sementara Lindrianasari (2007) memberi istilah dengan *Environmental Accounting Disclosure*. Selain itu, *green accounting* juga dikaitkan dengan *Triple Bottom Line Reporting* (Raar, 2002). Istilah terakhir ini juga dikenal dengan *Social and Environmental Reporting* dimana dalam pelaporannya keuangannya, perusahaan melaporkan kinerja aktivitas operasional perusahaan, kinerja lingkungan, dan kinerja sosialnya (Markus dan Ralph, 1999). Istilah lain bisa juga dipakai misalnya *Environmental Accounting*, *Social Responsibility Accounting*, dan lain sebagainya (Sofyan Syafri Harahap, 2002).

Penelitian untuk menguji pengaruh akuntansi lingkungan terhadap kinerja lingkungan antara lain telah dilakukan oleh Perez et al. (2007) serta Henri dan Journeault (2010) yang menemukan bahwa penyediaan informasi lingkungan kepada manajemen berpengaruh positif terhadap kinerja lingkungan. Sedangkan Ja'far dan Arifah (2006) menemukan bahwa full cost environmental accounting berpengaruh positif terhadap kinerja lingkungan. Selain kepada pihak internal, akuntansi lingkungan juga menyajikan informasi lingkungan kepada pihak eksternal. Penelitian yang dilakukan oleh Northcut (1995); Li dan McConomy (1999); Cormier dan Magnan (1999) menemukan adanya pengaruh positif akuntansi lingkungan terhadap pengungkapan informasi lingkungan. Pengungkapan yang dimaksud di sini adalah pengungkapan yang bersifat sukarela sebagai wujud tanggung jawab lingkungan perusahaan, yang biasanya disajikan dalam laporan tahunan, sustainability report, website, atau bentuk pengungkapan sukarela lainnya.

Burnett dan Hansen (2008) menyatakan bahwa jika perusahaan ingin

meningkatkan kinerja lingkungannya maka akuntansi harus terlibat di dalamnya untuk melakukan fungsi pengumpulan, penghitungan, analisis dan pelaporan biaya-biaya lingkungan dan transaksi lain yang berkaitan dengan lingkungan agar dapat digunakan oleh manajemen untuk mengelola aspek lingkungan. Tujuan utama dari akuntansi lingkungan adalah untuk mengoreksi kesenjangan informasi (*information gap*) yang timbul karena tidak teridentifikasinya biaya dan kerusakan lingkungan serta penggunaan informasi ini untuk mendukung keputusan bisnis (Dourala et al., 2003).

Kabupaten Banjarnegara (Jawa Tengah) dikenal sebagai daerah yang memiliki kontur tanah labil dengan demografi perbukitan. Data yang disebutkan oleh Badan penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) Banjarnegara, 70 % wilayah di daerah Banjarnegara merupakan zona merah rawan pergerakan tanah dan longsor. Ancaman longsor daerah Kabupaten Banjarnegara telah melanda ke daerah pemukiman dan juga sejumlah ruas titik jalan, salah satunya adalah jalan kabupaten, jalan provinsi, ataupun jalan nasional. Menurut pantauan dari Polres Banjarnegara, kawasan rawan longsor di jalan nasional yaitu di kecamatan Sigaluh. Ruas jalan nasional berada persis dibawah tebing dengan kemiringan mencapai 40 derajat. Titik paling banyak rawan bencana berada di jalan provinsi yaitu area jalur alternatif penghubung Kabupaten Banjarnegara dan Pekalongan via Karangobar. Di sepanjang jalan tersebut terdapat lebih dari delapan titik rawan longsor. Jalan provinsi ini berada dibawah tebing tinggi yang cukup membahayakan.

(<http://news.okezone.com/read/>).

Permasalahan muncul ketika bagaimana mengakui biaya akuntansi terkait dengan bencana yang sering terjadi di

Kabupaten Banjarnegara, sehingga peneliti memandang penerapan *green accounting* menjadi sangat penting untuk diterapkan di daerah Kabupaten Banjarnegara. Implementasi *green accounting* seharusnya sudah diterapkan oleh entitas apapun baik itu entitas privat maupun entitas publik. Hasil pemantauan sementara di daerah Kabupaten Banjarnegara para pemangku kepentingan pemerintah daerah di Kabupaten di Banjarnegara belum memahami adanya *green accounting* sehingga peneliti ingin mengetahui sejauh mana implementasi *green accounting* pada entitas publik yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara. Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk membuat penelitian yaitu “Implementasi *Green accounting* Pada Daerah Rawan Bencana (Studi Fenomenologis Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara).

## METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Moleong (2005: 3) menyebutkan bahwa penelitian kualitatif adalah “Penelitian yang menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati”. Dengan demikian penelitian kualitatif yang menggunakan metode deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran, deskripsi dan lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.

Adapun data yang penulis gunakan dalam penulisan penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer dalam penelitian ini berupa data wawancara yang

dihasilkan dari informan. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara tahun 2014 dan 2015 yang meliputi: laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan tahun 2014 dan tahun 2015.

Untuk memperoleh data dan bahan yang diperlukan dalam penelitian ini peneliti menggunakan insrtumen atau alat pengumpulan data sebagai berikut:

1. Teknik wawancara, yaitu melakukan tanya jawab langsung secara lisan dengan beberapa pihak yang berkompeten dan berwenang dalam memberikan data yang dibutuhkan pada bagian keuangan sehubungan dengan analisis laporan keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara.
2. Teknik dokumentasi, yaitu melakukan penghimpunan atas data-data sekunder untuk mendapatkan data yang mendukung penelitian ini, seperti laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Menurut Bungin (2007:73) teknik analisis dalam penelitian kualitatif tergantung pada pendekatan yang digunakan. Penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan fenomenologis, langkah-langkah analisisnya dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Peneliti memulai mengorganisasikan semua data atau gambaran menyeluruh tentang fenomena pengalaman yang telah dikumpulkan, yaitu data yang berupa data hasil wawancara dari informan yaitu Kepala DPPKAD dan Staf DPPKAD, yang kemudian ditriangulasikan dengan data laporan keuangan pemerintah daerah
- b. Membaca data secara keseluruhan dan membuat catatan pinggir mengenai data yang dianggap penting kemudian melakukan pengkodean data.

- c. Menemukan dan mengelompokkan makna pernyataan yang dirasakan oleh responden dengan melakukan *horizontaliting* yaitu setiap pernyataan pada awalnya diperlakukan memiliki nilai yang sama. Selanjutnya, pernyataan yang tidak relevan dengan topik dan pertanyaan maupun pernyataan yang bersifat repetitif atau tumpang tindih dihilangkan, sehingga yang tersisa hanya horizons (arti tekstural dan unsur pembentuk atau penyusun dari fenomena yang tidak mengalami penyimpangan).
- d. Pernyataan tersebut kemudian di kumpulkan ke dalam unit makna lalu ditulis gambaran tentang bagaimana pengalaman tersebut terjadi.
- e. Selanjutnya peneliti mengembangkan uraian secara keseluruhan dari fenomena tersebut sehingga menemukan esensi dari fenomena tersebut. Kemudian mengembangkan *textural description* (mengenai fenomena yang terjadi pada responden) dan *structural description* (yang menjelaskan bagaimana fenomena itu terjadi).
- f. Peneliti kemudian memberikan penjelasan secara naratif mengenai esensi dari fenomena yang diteliti dan mendapatkan makna pengalaman responden mengenai fenomena tersebut.
- g. Membuat laporan pengalaman setiap partisipan.

Menurut Patton (dalam Moleong, 2002:178), untuk menguji keabsahan data yang diperoleh, digunakan teknik Triangulasi Data. Jenis triangulasi data yang digunakan adalah triangulasi sumber yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam kualitatif, hal ini dapat dicapai dengan jalan:

(1) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara; (2) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi; (3) membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tertentu dalam situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu; (4) membandingkan keadaan dengan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang pemerintahan; (5) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. Penelitian ini akan melakukan pengamatan dengan menggunakan wawancara terhadap informan yaitu Kepala Desa dan Perangkat Desa yang kemudian ditriangulasikan dengan hasil wawancara dengan auditor eksternal. Atas dasar langkah di atas, dalam penelitian ini, analisis data dilakukan sebagai berikut :

- a. Membaca transkrip untuk mengidentifikasi kemungkinan tema-tema yang muncul;
- b. Tema ini dapat memodifikasi proses pengambilan data;
- c. Membaca transkrip berulang-ulang sebelum melakukan koding untuk memperoleh ide umum tentang tema, sekaligus menghindari kesulitan;
- d. Selalu membawa buku catatan, komputer atau *tape recorder* untuk mencatat pemikiran-pemikiran analitis yang muncul secara spontan.
- e. Membaca kembali data dan catatan analisis secara teratur, dan segera menuliskan tambahan-tambahan pemikiran, pertanyaan-pertanyaan.
- f. Mengembangkan interpretasi data dari hasil wawancara dan pengamatan, sesuai dengan tema dan tujuan penelitian dan menuangkan dalam draft laporan yang telah terstruktur dalam sistematika laporan.

g. Meng-edit dan me-review kembali tema demi tema dan secara keseluruhan, sekaligus sebagai *cross-check* antar data dan informasi yang saling bertentangan untuk dikonfirmasi kembali kepada responden atau dilakukan pengecekan terhadap dokumentasi data lainnya seperti peraturan perundangan dan lain-lain.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Banjarnegara adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Ibukotanya namanya juga Banjarnegara. Kabupaten Banjarnegara terletak di antara 7° 12' - 7° 31' Lintang Selatan dan 109° 29' - 109° 45'50" Bujur Timur. Luas Wilayah Kabupaten Banjarnegara adalah 106.970,997 ha atau 3,10 % dari luas seluruh Wilayah Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang di Utara, Kabupaten Wonosobo di Timur, Kabupaten Kebumen di Selatan, dan Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga di Barat.

Topografi wilayah ini sebagian besar (65% lebih) berada di ketinggian antara 100 s/d 1000 meter dari permukaan laut. Secara rinci pembagian wilayah berdasarkan topografi. Kurang dari 100 m dari permukaan air laut, meliputi luas 9,82 % dari seluruh luas wilayah Kabupaten Banjarnegara, meliputi Kecamatan Susukan dan Purworejo Klampok, Mandiraja, Purwanegara dan Bawang. Antara 100 – 500 m dari permukaan air laut, meliputi luas 37,04 % dari seluruh luas wilayah Kabupaten Banjarnegara, meliputi Punggelan, Wanadadi, Rakit, Madukara, sebagian Susukan, Mandiraja, Purwanegara, Bawang, Pagedongan, Banjarmangu dan Banjarnegara. Antara 500 - 1.000 m dari permukaan air laut, meliputi luas 28,74%

dari seluruh luas wilayah Kabupaten Banjarnegara, meliputi Kecamatan Sigaluh, sebagian Banjarnegara, Pagedongan dan Banjarmangu. Lebih dari 1.000 m dari permukaan air laut, meliputi luas 24,40% dari seluruh wilayah Kabupaten Banjarnegara meliputi kecamatan Pejawaran, Batur, Wanayasa, Kalibening, Pandanarum, Karangkoobar dan Pagentan. Sungai Serayu mengalir menuju ke Barat, serta anak-anak sungainya termasuk Kali Tulis, Kali Merawu, Kali Pekacangan, Kali Gintung dan Kali Sapi. Sungai tersebut dimanfaatkan sebagai sumber irigasi pertanian. Wilayah kabupaten Banjarnegara memiliki iklim tropis, dengan curah hujan rata-rata 3.000 mm/tahun, serta suhu rata-rata 20° - 26 °C.

([https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Banjarnegara](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Banjarnegara))

*Green accounting* merupakan ilmu akuntansi yang mengakui adanya faktor biaya lingkungan kedalam hasil kegiatan perusahaan. Menurut EPA, akuntansi hijau merupakan bentuk pendekatan gabungan yang menyediakan bentuk transisi data dari akuntansi keuangan dan akuntansi biaya untuk meningkatkan efisiensi bahan dan mengurangi dampak serta risiko lingkungan sekaligus mengurangi biaya perlindungan lingkungan.

Berdasarkan PSAK No.1 revisi 2009 paragraf 12 penyajian dampak lingkungan adalah sebagai berikut: *Entitas dapat pula menyajikan, terpisah dari laporan keuangan, laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (value added statement), khususnya bagi industri dimana faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap karyawan sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting. Laporan tambahan tersebut di luar ruang lingkup Standar Akuntansi Keuangan.*

Pada PSAK No. 57 revisi 2009 sebagian paragraf 19 berbunyi sebagai berikut: *Kewajiban diestimasi diakui hanya bagi kewajiban yang timbul dari peristiwa masalah, yang terpisah dari tindakan entitas pada masa datang (yaitu penyelenggaraan entitas pada masa datang). Contoh kewajiban ini adalah denda atau biaya pemulihan pencemaran lingkungan, yang mengakibatkan arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban itu tanpa memandang tindakan entitas pada masa datang demikian juga, entitas mengakui kewajiban diestimasi bagi biaya kegiatan purna operasi (decommissioning) instalasi minyak atau instalasi nuklir sebatas jumlah yang harus ditanggung entitas untuk memperbaiki kerusakan yang telah ditimbulkan.* PSAK memang belum mengatur secara tegas dan rinci hal-hal apa saja yang wajib diungkapkan dalam pelaporan suatu entitas bisnis. Dan jika ditelaah dari isi PSAK tersebut pengungkapan pelaporan atas dampak lingkungan tersebut masih bersifat sukarela.

Sesuai dengan prosedur penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis, organisasi data dimulai dengan menyajikan semua data atau gambaran menyeluruh tentang fenomena pengalaman yang telah dikumpulkan (lampiran X: transkrip wawancara). Setelah membaca keseluruhan transkrip wawancara, dilakukan pengkodean data untuk membagi jawaban responden tentang dua permasalahan besar penelitian ini yaitu pemahaman terhadap accrual basis dan kesiapan pengelola keuangan daerah (lampiran Y: coding). Setelah data tersaji sesuai kode, dilakukan *horizontaliting* yaitu setiap pernyataan pada awalnya diperlakukan memiliki nilai yang sama. Selanjutnya, pernyataan yang tidak relevan dengan topik dan pertanyaan

maupun pernyataan yang bersifat repetitif atau tumpang tindih dihilangkan, sehingga yang tersisa hanya horizons (arti tekstural dan unsur pembentuk atau penyusun dari fenomena yang tidak mengalami penyimpangan). Pernyataan tersebut kemudian di kumpulkan ke dalam unit makna lalu ditulis gambaran tentang bagaimana pengalaman tersebut terjadi.

*Horizontaliting* pertama dilakukan untuk mendapatkan informasi yang bermakna mengenai implementasi *green accounting* pada Pemerintah Daerah Banjarnegara. Dalam proses penyusunan transkrip pertanyaan *in-depth interview* pemahaman mendasarpada Kepala dan Staf DPKAD. Dalam proses penyusunan transkrip pertanyaan *in-depth interview* pemahaman mendasar pada Kepala dan Staf DPKAD mengenai implementasi *green accounting* diuraikan menjadi beberapa point pertanyaan, yaitu:

1. Apakah Kepala dan Staf DPKAD telah mengetahui dan memahami *green accounting*?
2. Apakah konservasi lingkungan sudah diterapkan di Pemerintah Daerah Banjarnegara?
3. Apakah Pemerintah Daerah Banjarnegara telah mengimplementasikan *green accounting* pada tata keuangan Pemerintah Daerah?
4. Bagaimana cara Pemerintah Daerah Banjarnegara dalam menanggulangi peristiwa tak terduga terkait lingkungan di Banjarnegara?
5. Apakah ada rekening khusus terkait biaya lingkungan pada tata keuangan Pemerintah Daerah?
6. Apakah ada pihak eksternal yang berkontribusi dalam biaya lingkungan pada Pemerintah Daerah Banjarnegara?
7. Apakah akuntansi lingkungan penting bagi Pemerintah Daerah Banjarnegara?

8. Apakah ada laporan keuangan khusus untuk biaya lingkungan yang telah diterapkan pada Pemerintah Daerah Banjarnegara?

9. Bagaimana yang menjadi kendala Pemerintah Daerah dalam menerapkan *green accounting*?

Sesuai dengan prosedur penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis, setelah dilakukan *horizontaliting* dan pernyataan masing-masing partisipan telah dikumpulkan ke dalam unit makna dan ditulis gambaran tentang bagaimana pengalaman tersebut terjadi, selanjutnya hasil tersebut dikembangkan melalui uraian secara keseluruhan dari fenomena yang ada sehingga menemukan esensi dari fenomena tersebut. Dalam pembahasan ini akan dinarasikan tentang *textural description* (mengenai fenomena yang terjadi pada partisipan) dan *structural description* (yang menjelaskan bagaimana fenomena itu terjadi). Selanjutnya akan diberikan penjelasan secara naratif mengenai esensi dari fenomena yang diteliti dan mendapatkan makna pengalaman partisipan mengenai fenomena tersebut sehingga tersusun laporan pengalaman setiap partisipan.

Indikator pertama dari pemahaman Kepala dan Staf DPKAD Banjarnegara mengenai *green accounting* adalah apakah Kepala dan Staf DPKAD telah mengetahui dan memahami konsep *green accounting*? Dari kedua partisipan menunjukkan bahwa mereka belum mengetahui konsep *green accounting*. Pernyataan ini dilengkapi oleh pernyataan dari Kepala DPKAD dengan pernyataan sebagai berikut:

“Gimana yg dimaksud akuntansi lingkungan ini?”

Indikator kedua dari pemahaman Kepala dan Staf DPKAD Banjarnegara mengenai *green accounting* adalah apakah Pemerintah Daerah sudah menerapkan

konservasi lingkungan. Dari kedua partisipan menunjukkan bahwa Pemda Banjarnegara telah menerapkan konservasi lingkungan. Pernyataan ini dilengkapi oleh pernyataan dari Kepala DPKAD dengan pernyataan sebagai berikut:

*“Kemudian contoh lagi, nanti Pak Tono bisa jelaskan, contoh lagi kaitannya dengan apalagi Banjarnegara kan ee sudah menyatakan Banjarnegara sebagai Kabupaten Konservasi yaitu penghijauan, reboisasi disana kan sangat diutamakan spt kemarin terjadi bencana alam tanah longsor di Karang Kobar itu, Karang Kobar yang di Jemblung itu kan eee dari pemukiman itu kan rata semua dengan tanah yang jatuh dari atas, itu pemerintah kemudian ee apa namanya menata pemukiman, menyediakan pemukiman untuk warga masyarakat yg terkena bencana itu, disediakan lahan kemudian disahkan rumah juga, tapi lahan yg terkena bencana itu kemudian dijadikan lahan konservasi untuk penanaman kembali agar ke depan diharapkan tidak terjadi bencana spt itu. Kalau di anggaran yg selain anggaran tak terduga ee apa namanya ee logistik bencana”*

Indikator ketiga dari pemahaman Kepala dan Staf DPKAD Banjarnegara mengenai *green accounting* adalah apakah Pemerintah Daerah Banjarnegara telah mengimplementasikan *green accounting* pada tata keuangan pemerintah. Dari kedua partisipan menunjukkan bahwa Pemda Banjarnegara telah menerapkan *green accounting* pada tata keuangan pemerintah. Pernyataan ini dilengkapi oleh pernyataan dari Kepala DPKAD dengan pernyataan sebagai berikut:

*“Jadi intinya kalau, kalau, saya cerita gapapa ya saya cerita, jadi kalau di Pemkab, kalau di Pemkab itu di penganggaran, di penganggaran itu memang ada yang untuk membackup ee... mencegah*

*kebencanaan, bencana alam, bencana sosial, jadi seperti Banjarnegara yang sering terjadi bencana misalnya di musim hujan, tanah longsor, banjir, kemudian di musim kemarau kita ada kekeringan, kalau kekeringan ini sih bisa diatasi dengan eee supply air, tapi kalau yang bencana alam ini yg cukup merepotkan juga.”*

Indikator keempat dari pemahaman Kepala dan Staf DPKAD Banjarnegara mengenai *green accounting* adalah bagaimana cara Pemerintah Daerah Banjarnegara dalam menanggulangi peristiwa tak terduga terkait lingkungan di Banjarnegara. Dari kedua partisipan menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Banjarnegara telah memiliki cara khusus dalam menanggulangi peristiwa tak terduga di Daerah Banjarnegara. Pernyataan ini dilengkapi oleh pernyataan dari Kepala DPKAD dengan pernyataan sebagai berikut:

*“Jadi segi penganggaran ini memang sudah dialokasikan sedemikian rupa, itu penganggarnya di APBD itu menggunakan Belanja Tidak Terduga, Belanja Tidak Terduga itu disana memang mengamanatkan penggunaan untuk apa saja dan selektif sekali antara lain untuk bencana alam itu juga digunakan untuk penanganan hal-hal yg sifatnya darurat, sifat kedaruratan bencana. Sebagai contoh misalnya kedaruratan bencana ini ada jalan putus, tidak ada akses,*

Indikator kelima dari pemahaman Kepala dan Staf DPKAD Banjarnegara mengenai *green accounting* adalah apakah ada rekening khusus terkait biaya lingkungan pada tata keuangan Pemerintah Daerah. Dari kedua partisipan menunjukkan bahwa pada Pemerintah Daerah Banjarnegara telah ada rekening khusus terkait biaya lingkungan pada tata keuangan Pemerintah Daerah. Pernyataan ini



dilengkapi oleh pernyataan dari Kepala DPKAD dengan pernyataan sebagai berikut:

*“Jadi segi penganggaran ini memang sudah dialokasikan sedemikian rupa, itu penganggarnya di APBD itu menggunakan Belanja Tidak Terduga”*

Indikator keenam dari pemahaman Kepala dan Staf DPKAD Banjarnegara mengenai *green accounting* adalah apakah ada pihak eksternal yang berkontribusi dalam biaya lingkungan pada Pemerintah Daerah Banjarnegara. Dari kedua partisipan menunjukkan bahwa pada Pemerintah Daerah Banjarnegara telah ada pihak eksternal yang berkontribusi dalam biaya lingkungan Pemerintah Daerah Banjarnegara. Pernyataan ini dilengkapi oleh pernyataan dari Kepala DPKAD dengan pernyataan sebagai berikut:

*“iya, jadi agar terarah. Dulu misalnya CSR dari Bank Jateng misalnya itu digunakan untuk membuat apa namanya jalan evakuasi. Jadi di daerah Banjarnegara bagian utara itu kan karna seringnya,”*

Indikator ketujuh dari pemahaman Kepala dan Staf DPKAD Banjarnegara mengenai *green accounting* adalah apakah akuntansi lingkungan penting bagi Pemerintah Daerah Banjarnegara. Dari kedua partisipan menunjukkan bahwa pada Pemerintah Daerah Banjarnegara sudah mempunyai sistem pencatatan keuangan yang terintegrasi sehingga akuntansi lingkungan penting untuk laporan keuangan. Pernyataan ini dilengkapi oleh pernyataan dari Kepala DPKAD dengan pernyataan sebagai berikut:

*“Kalau keuangan dari Pemda sih terintegrasi. Pemda kan ada pendapatan, belanja, semuanya itu terintegrasi, jadi laporan keuangan pemerintah daerah, seperti itu. Tapi tidak tahu ya kalau di BPPT apa ada sendiri atau... Eeee ya kalau dana yang dihimpun itu ada laporannya*

*sendiri, kan ada kepedulian masyarakat, misalnya setiap ada bencana kita kan membuka peduli, posko-posko peduli Banjarnegara, dan Banjarnegara pada waktu itu yang Pemkab itu menghimpun yg untuk Jemblong itu bisa, itu nanti ada auditnya sendiri memang. Kalau yg dana masyarakat ini terpisah dari APBD. dari APBD Belanja Tak Terduga itu memang laporannya jadi satu, kalau yg berasal dari masyarakat itu laporannya tersendiri,”*

Indikator kedelapan dari pemahaman Kepala dan Staf DPKAD Banjarnegara mengenai *green accounting* adalah apakah ada laporan keuangan khusus untuk biaya lingkungan yang telah diterapkan pada Pemerintah Daerah Banjarnegara. Dari kedua partisipan menunjukkan bahwa pada Pemerintah Daerah Banjarnegara ada laporan keuangan khusus yang terpisah dari APBD. Pernyataan ini dilengkapi oleh pernyataan dari Kepala DPKAD dengan pernyataan sebagai berikut:

*“Kalau yg dana masyarakat ini terpisah dari APBD. dari APBD Belanja Tak Terduga itu memang laporannya jadi satu, kalau yg berasal dari masyarakat itu laporannya tersendiri,”*

Indikator kesembilan dari pemahaman Kepala dan Staf DPKAD Banjarnegara mengenai *green accounting* adalah apakah kendala Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dalam menerapkan *green accounting*. Dari kedua partisipan menunjukkan bahwa pada Pemerintah Daerah Banjarnegara ada kendala dalam menerapkan *green accounting* di Kabupaten Banjarnegara. Pernyataan ini dilengkapi oleh pernyataan dari Kepala DPKAD dengan pernyataan sebagai berikut:

*“Kita dapet barang luar biasa waktu itu juga masa exped nya juga tidak terlalu lama, dari perusahaan besar itu kan juga menyumbangkan dengan mensortir dulu itu*

*ya, jadi tinggal beberapa, kemarin kan terjadi, ya kalau boleh saya ngomong ya mubadzir juga, karena apa, barang itu tidak boleh diberikan selain kepada orang yang kena bencana, sudah komunikasi dengan Polres, dengan Kejaksaan ini tetep keuntungannya untuk bencana, jadi iya udah mas, barang gitu mubadzir terus dimusnahkan. itu yg kadang kita sendiri, lho aturan kok seperti itu, waktu itu sempat kita mengusulkan nganu, barang itu kalau itu diperuntukan seperti itu gak masalah tapi sambil menunggu ada pengajuan-pengajuan dari yg kena bencana itu ini kita puter dulu, kaya gula, biskuit, itu maksudnya kita serahkan ke pasar dulu ya untuk dijual, la nanti hasilnya itu suatu saat kita butuh kita ambil lagi gitu lo, ndak boleh seperti itu, kalau seperti itu kan kita punya stock terus kan. tapi ndak boleh, kalau melihat itu udah nangis batin, yang namanya air mineral itu hehe ya kondisinya seperti itu”*

Triangulasi data dilakukan dengan cara mengonfirmasi jawaban partisipan pengelola *green accounting* yaitu Kepala DPPKAD dengan Staf DPKAD dengan triangulasi data dengan menggunakan data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara. Menurut data yang terintegrasi dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara, yang dijelaskan pada Catatan Atas Laporan keuangan yaitu : Sebagaimana diketahui bahwa Kabupaten Banjarnegara termasuk salah satu Kabupaten yang rawan terjadi bencana alam terutama tanah longsor. Dan pada Hari Jum'at Tanggal 12 Desember 2014 telah terjadi bencana alam tanah longsor di Dusun Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangobar. Bencana tanah longsor tersebut mengubur sekitar 40 rumah yang dihuni oleh 300 jiwa dari 53 keluarga.

Jumlah warga Dusun Jemblung yang tertimpa longsor diperkirakan sekitar 108 orang, sedangkan warga lain berhasil menyelamatkan diri. Selain itu, sejumlah mobil yang sedang melintas di Jalan Karangobar-Banjarnegara juga turut tertimpa longsor, sehingga jumlah pasti korban meninggal dalam bencana ini diperkirakan jauh di atas angka yang muncul di media masa. Dalam rangka membantu korban bencana tanah longsor tersebut, sejumlah elemen masyarakat dan dunia usaha banyak menyumbangkan dana maupun logistik. Selanjutnya pengelolaan bantuan bencana dimaksud dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banjarnegara. Dengan adanya bantuan bencana dari masyarakat dan dunia usaha yang berupa uang, maka untuk memudahkan masyarakat dan dunia usaha yang akan memberikan bantuan di wilayah Kabupaten Banjarnegara, perlu ditetapkan nama bank dan nomor rekening untuk menampung bantuan dana dimaksud. Penetapan tersebut dituangkan dalam Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 900/1333 Tahun 2014 tentang Penetapan Nama Bank dan Nomor Rekening Untuk Menampung Bantuan dari Masyarakat dan Dunia Usaha. Sesuai dengan keputusan bupati tersebut, nama bank dan nomor rekening yang digunakan adalah:

- a. Nama Bank : Bank BRI Cabang Banjarnegara  
Nomor Rekening : 0004-01-036562-50-219  
Nama Rekening : Peduli Bencana Banjarnegara Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013 dan 2012.
- b. Nama Bank : Bank BPD Jawa Tengah Cabang Banjarnegara

Nomor Rekening : 3013-231108  
Nama Rekening : Peduli Bencana Banjarnegara Saldo dana bantuan masyarakat dan dunia usaha yang tertampung dalam kedua rekening tersebut, per 31 Desember 2014, sebagai berikut:

- a) Bank BRI Cabang Banjarnegara (0004-01-036562-50-1)  
Rp2.423.038.420,00;
- b) Bank Jateng Cabang Banjarnegara (3013-231108)  
Rp2.579.679.380,00.

Selanjutnya penggunaan atas bantuan bencana yang berupa uang maupun barang telah diatur dalam Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bantuan Bencana Yang Bersumber dari Masyarakat dan Dunia Usaha.

Sesuai dengan peraturan bupati dimaksud, bantuan dalam bentuk uang digunakan untuk:

- a. Penanggulangan bencana, meliputi:
  - 1) Penanggulangan pada masa pra bencana
  - 2) Penanggulangan pada saat siaga bencana, darurat bencana dan transisi darurat bencana; dan
  - 3) Penanggulangan pada masa pasca bencana.
- b. Memenuhi kebutuhan korban bencana, meliputi :
  - 1) Kebutuhan sandang dan pangan
  - 2) Kebutuhan pengadaan tanah untuk relokasi
  - 3) Kebutuhan perumahan/tempat tinggal
  - 4) Bantuan Modal
  - 5) Infrastruktur dan atau fasilitas umum lainnya
  - 6) Pengadaan barang/ jasa untuk kepentingan penanggulangan bencana

- 7) Membiayai kegiatan operasional penanggulangan bencana pada masa siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat yang tidak dibiayai dari APBD maupun APBN.

Untuk bantuan dalam bentuk barang, penggunaannya untuk :

- a) Korban bencana langsung dan korban bencana tidak langsung/terdampak
- b) Kegiatan pelatihan teknis kebencanaan yang tidak dibiayai dari APBD maupun APBN
- c) Kegiatan operasional Posko Bencana yang tidak dibiayai dari APBD maupun APBN
- d) Masyarakat yang sedang melakukan kerja bhakti/ gotong royong dalam rangka penanggulangan bencana.
- e) Daerah/kabupaten lain yang terkena bencana atau
- f) Daerah/kabupaten lain yang terkena bencana atau
- g) Yayasan sosial/panti, asuhan/keluarga kurang mampu.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai penanggungjawab teknis pengelola bantuan bencana mempunyai kewajiban untuk melaporkan pengelolaan bantuan kepada Bupati. Selanjutnya Bupati dapat menunjuk akuntan publik atau aparat pengawas intern pemerintah untuk melakukan audit terhadap pertanggungjawaban pengelolaan bantuan bencana.

Berdasarkan studi fenomenologi yang dilakukan dalam penelitian ini dapat diuraikan jbaran narasi mengenai pengalaman partisipan Kepala DPPKAD dan Staf DPPKAD adalah berdasarkan studi fenomenologi yang dilakukan dalam penelitian ini dapat diuraikan jbaran narasi mengenai pengalaman partisipan Kepala DPPKAD dan Staf DPPKAD adalah Pemangku

Kepentingan Pemerintah Daerah Banjarnegara belum memahami adanya istilah *green accounting* namun dalam pelaksanaannya Pemangku Kepentingan Pemerintah Daerah Banjarnegara telah menerapkan *green accounting* hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara yang menyatakan bahwa penganggaran untuk darurat bencana telah diposkan pada mata anggaran dana darurat, namun untuk penggunaan anggaran tersebut bersifat konsumtif atau logistik bencana, sehingga ketika kerusakan tersebut diperbaiki dengan semestinya harus dianggarkan oleh DPU agar kerusakan tersebut diperbaiki dengan penggunaan dana infrastruktur yang menjadi mata anggaran pada DPU.

Bantuan bencana seperti logistik dan lain sebagainya, dikelola oleh BPPD yang kemudian BPPD mendapatkan bantuan CSR dari berbagai pihak, seperti halnya Bank Jateng. Apabila konsumsi bencana ini tidak habis dalam penggunaannya, maka harus dimusnahkan, jadi tidak bisa dijual kembali dalam bentuk kas, namun harus dibakar dan dimusnahkan. Evaluasi dalam penanggulangan bencana biasanya diaudit oleh penunjukan akuntan publik dan juga BPKP, sehingga proses penanganan bencana di Kabupaten Banjarnegara memang sudah terintegrasi dengan baik.

Menurut Catatan Atas Laporan Keuangan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Banjarnegara, menyebutkan bahwa pengelolaan bantuan bencana dimaksud dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banjarnegara. Dengan adanya bantuan bencana dari masyarakat dan dunia usaha yang berupa uang, maka untuk memudahkan masyarakat dan dunia usaha yang akan memberikan bantuan di wilayah Kabupaten Banjarnegara, perlu ditetapkan nama bank dan nomor rekening

untuk menampung bantuan dana dimaksud. Penetapan tersebut dituangkan dalam Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 900/1333 Tahun 2014 tentang Penetapan Nama Bank dan Nomor Rekening Untuk Menampung Bantuan dari Masyarakat dan Dunia Usaha. Sesuai dengan keputusan bupati tersebut, nama bank dan nomor rekening yang digunakan adalah:

a. Nama Bank : Bank BRI Cabang Banjarnegara  
Nomor Rekening : 0004-01-036562-50-219

Nama Rekening : Peduli Bencana Banjarnegara Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013 dan 2012.

b. Nama Bank : Bank BPD Jawa Tengah Cabang Banjarnegara  
Nomor Rekening : 3013-231108

Nama Rekening : Peduli Bencana Banjarnegara Saldo dana bantuan masyarakat dan dunia usaha yang tertampung dalam kedua rekening tersebut, per 31 Desember 2014, sebagai berikut:

a) Bank BRI Cabang Banjarnegara (0004-01-036562-50-1)

Rp2.423.038.420,00;

b) Bank Jateng Cabang Banjarnegara (3013-231108)

Rp2.579.679.380,00.

Selanjutnya penggunaan atas bantuan bencana yang berupa uang maupun barang telah diatur dalam Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bantuan Bencana Yang Bersumber dari Masyarakat dan Dunia Usaha.

Sesuai dengan peraturan bupati dimaksud, bantuan dalam bentuk uang digunakan untuk:

- a. Penanggulangan bencana, meliputi:
  - 1) Penanggulangan pada masa pra bencana
  - 2) Penanggulangan pada saat siaga bencana, darurat bencana dan transisi darurat bencana; dan
  - 3) Penanggulangan pada masa pasca bencana.
- b. Memenuhi kebutuhan korban bencana, meliputi :
  - 1) Kebutuhan sandang dan pangan
  - 2) Kebutuhan pengadaan tanah untuk relokasi
  - 3) Kebutuhan perumahan/tempat tinggal
  - 4) Bantuan Modal
  - 5) Infrastruktur dan atau fasilitas umum lainnya
  - 6) Pengadaan barang/ jasa untuk kepentingan penanggulangan bencana
  - 7) Membiayai kegiatan operasional penanggulangan bencana pada masa siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat yang tidak dibiayai dari APBD maupun APBN.

Untuk bantuan dalam bentuk barang, penggunaannya untuk :

- a) Korban bencana langsung dan korban bencana tidak langsung/terdampak
- b) Kegiatan pelatihan teknis kebencanaan yang tidak dibiayai dari APBD maupun APBN
- c) Kegiatan operasional Posko Bencana yang tidak dibiayai dari APBD maupun APBN
- d) Masyarakat yang sedang melakukan kerja bhakti/ gotong royong dalam rangka penanggulangan bencana.
- e) Daerah/kabupaten lain yang terkena bencana atau
- f) Daerah/kabupaten lain yang terkena bencana atau

- g) Yayasan sosial/panti, asuhan/keluarga kurang mampu.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai penanggungjawab teknis pengelola bantuan bencana mempunyai kewajiban untuk melaporkan pengelolaan bantuan kepada Bupati. Selanjutnya Bupati dapat menunjuk akuntan publik atau aparat pengawas intern pemerintah untuk melakukan audit terhadap pertanggungjawaban pengelolaan bantuan bencana.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Pemahaman implementasi green accounting di daerah Banjarnegara sudah baik. Hal ini terbukti dari hasil *in-depth interview* dan observasi partisipan sudah mengetahui prosedur mengenai pengelolaan berkaitan tanggap darurat bencana, laporan keuangan mengenai *green accounting* yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah Banjarnegara sudah terintegrasi dengan baik dan diaudit oleh BPKP maupun penunjukan kantor akuntan publik. Secara teoritik, perangkat Desa Donorojo telah siap untuk mengimplementasikan *green accounting*. Hal ini terlihat pada laporan keuangan yang sudah terintegrasi mengenai green accounting, pengelolaan yang tepat dan ditangani oleh BPPD daerah setempat, kesulitan yang dihadapi adalah pengelolaan logistik sisa yang tidak bisa dicairkan menjadi kas tetapi harus dimusnahkan. Hal ini menyebabkan perlunya pemahaman lebih mendalam mengenai *green accounting*.

### **Saran**

Perlu membuat laporan khusus sukarela pada Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara serta implementasi green accounting sebaiknya tidak hanya difokuskan pada darurat bencana, tetapi juga konservasi

lingkungan agar mampu mencegah terjadinya bencana, sebagai contoh, larangan penebangan hutan secara ilegal dan juga reboisasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Almilia, Luciana Spica dan Wijayanto, Dwi.2007. *Pengaruh Environmental Performance Dan Environmental Disclosure Terhadap Economic Performance*. Proceedings The 1st Accounting Conference. Depok, 7 – 9 November 2007.
- Bebbington, J. (1997). “*Engagement, education, and sustainability*”. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*. Volume 10. No 3., pp.365-381.
- Bell, F dan Lehman, G. 1999. *Recent Trends in Environment Accounting: How Green Are Your Account*. *Accounting Forum*.
- Bungin Burhan. (2008), “*Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi,*” Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Burnett, R.D. and Hansen, D.R. 2008. “*Ecoefficiency: Defining a role for environmental cost management*”. *Accounting, Organizations and Society* 33: 551-581.
- Cohen, N., dan P. Robbins. 2011. *Green Business: An A-to-Z Guide*. Thousand Oaks. California: SAGE Publications Inc.
- Cormier, D. and Magnan, M. 1999. “*Corporate environmental disclosure strategies: determinants, costs and benefits*”. *Journal of Accounting, Auditing and Finance*: 429-51.
- Dewi, Santi Rahma, 2016. *Pemahaman Dan Kepedulian Penerapan Green Accounting : Studi Kasus UKM Tahu Di Sidoarjo*.
- Harahap, S.S. (2002). *Teori Akuntansi*. Edisi revisi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Henri, Jean-François and Journeault, Marc. 2010. “*Eco-control: The influence of management control systems on environmental and economic performance*”. *Accounting, Organizations and Society* 35: 63–80.
- Ja'far S., dan Dista Amalia, 2006. *Pengaruh dorongan manajemen lingkungan, manajemen lingkungan proaktif fan kinerja lingkungan terhadap public environmental reporting*. *Simposium Nasional Akuntansi IX*. Padang : UNAND.
- Li, Y. and McConomy, B. 1999. “*An empirical examination of factors affecting the timing of environmental accounting standard adoption and the impact on corporate valuation*”. *Journal of Accounting, Auditing and Finance* 14: 279-313.
- Lindrianasari. 2007. *Hubungan antara Kinerja Lingkungan dan Kualitas Pengungkapan Lingkungan dengan Kinerja Ekonomi Perusahaan di Indonesia*. JAAI. Vol 11.No2.
- McHugh, J. 2008. *Accountants have key role in sustainability*. Public Finance; Dec 14, Academic Research Library.
- Mehenna, Y. and Vernon P. D., (2004). “*Environmental Accounting : An Essential Component Of Business Strategy*”. *Business Strategy and the Environment*. *Bus. Strat. Env.* 13, 65–77.

- Milne, M.J. and Ralph, W. A. (1999). "Exploring the reliability of social and environmental disclosures content analysis". *Accounting, Auditing & Accountability Journal*. Bradford:1999. Vol. 12, Iss. 2; pg. 237.
- Ministry of the Environment Japan, Environmental Accounting Guidelines, 2005.
- Moleong, Lexy J., 2005, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Edisi Revisi, Penerbit PT Remaja Rosdakarya.
- Northcut, D. 1995. *Environmental accounting policies in firms subject to Superfund cleanup costs*. Working Paper, University of Chicago.
- Pasal 4 UUPH No. 23 Tahun 1997.
- Pasal 74 UU Nomor 40 Tahun 2007.
- Perez, E.A., Ruiz, C.C., and Fenech, F.C. 2007. "Environmental management systems as an embedding mechanism: a research note". *Accounting, Auditing & Accountability Journal* 20 (3): 403-422.
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). No. 1.
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). No. 1 Revisi 2009.
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). No. 32.
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). No. 33.
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). No. 57.
- PP No. 47 Tahun 2012.
- Pramanik, *at.al* ; (2007). *Emironmental Accounting and Reporting*, New Delhi, Deep Publication P.V.T ltd. Rocky Harris.
- Raar, J. 2002 . *Environmental initiatives: Towards triple-bottom line reporting*. Corporate Communications. Bradford: Vol.7, Iss. 3; pg. 169, 15 pgs.
- Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- Wiedmann, T. and Manfred, L. (2006). "Third Annual International Sustainable Development Conference Sustainability-Creating the Culture". 15-16 November 2006, Perth, Scotland.
- <http://adi04wahyudi.wordpress.com/pendidikan/akuntansi-biaya-lingkungan/>. Diakses pada tanggal 1 April 2017.
- <http://mychocochips.blogspot.co.id/2014/02/mengenal-green-accounting-lebih-dekat.html>. Diakses pada tanggal 1 April 2017